



PEDAGOGIK

Jurnal Pendidikan dan Riset

E-ISSN: 3025-7719
Vol. 2, No. 3 2024, Hal. 401-408

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Era Digital

Maulindawati Ritonga

SDN 01 Bilah Hulu, Indonesia
N Empat Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara

Email: maulindawatiritonga123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan pendidikan agama Islam di era digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pendidikan Agama Islam di era digital sangat penting untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Dengan merumuskan kebijakan yang adaptif, relevan, dan inklusif, pendidikan agama dapat dioptimalkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Kebijakan ini harus mencakup pengembangan kurikulum yang sesuai, pelatihan guru, peningkatan literasi digital, serta pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, memastikan aksesibilitas bagi semua siswa, serta mendukung kesehatan mental mereka. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kebijakan pendidikan agama akan mampu membentuk generasi yang tidak hanya beriman, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia modern dengan bijak dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, PAI

ABSTRACT

This research aims to describe Islamic religious education policies in the digital era. The research method used in this study is the literature study method. The results of the study show that Islamic Religious Education policies in the digital era are very important to answer challenges and take advantage of the opportunities offered by technological advances. By formulating policies that are adaptive, relevant, and inclusive, religious education can be optimized to support a more engaging and effective learning process. This policy must include the development of appropriate curricula, teacher training, digital literacy improvement, and the use of social media and information technology. Additionally, it is important to involve the community in the policy process, ensure accessibility for all students, and support their mental health. With a holistic and sustainable approach, religious education policies will be able to form a generation that is not only faithful, but also ready to face the challenges of the modern world wisely and responsibly.

Keywords: Policy, Education, PAI

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di tengah perubahan ini, kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia juga perlu beradaptasi dengan era digital untuk tetap relevan dan efektif. Kebijakan pendidikan yang responsif terhadap perubahan zaman menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa nilai-nilai agama tetap terjaga di tengah arus informasi yang sangat cepat dan beragam.

Kebijakan pendidikan yang baik seharusnya mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan media digital dalam pendidikan agama bukan hanya sekadar pemanfaatan alat, tetapi juga mencakup pengembangan metode dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa di era digital. Melalui kebijakan yang tepat, pendidikan agama dapat menjangkau siswa secara lebih luas dan mendalam. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam kebijakan PAI di era digital adalah perlunya integrasi teknologi dalam kurikulum (Noor, 2019). Dalam hal ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang memungkinkan penggunaan teknologi dalam pengajaran agama tanpa mengurangi esensi nilai-nilai keagamaan yang diajarkan. Dengan mengintegrasikan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi ajar.

Kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan kebutuhan pengembangan kompetensi guru dalam mengajar di era digital. Guru sebagai fasilitator pembelajaran perlu dibekali dengan keterampilan teknologi informasi yang memadai agar dapat mengimplementasikan pembelajaran digital secara efektif. Tanpa dukungan dan pelatihan yang memadai, upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam PAI tidak akan berjalan dengan baik. Di samping itu, penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai agama. Kebijakan PAI di era digital seharusnya mendorong penggunaan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Melalui konten yang menarik dan relevan, pendidikan agama dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh generasi muda (Aslahuddin et al, 2023).

Namun, tantangan lain yang muncul adalah risiko penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat di dunia maya. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan harus menekankan pentingnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Dengan keterampilan ini, siswa dapat lebih selektif dalam menyaring informasi yang mereka terima, sehingga dapat menghindari pengaruh negatif dari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kebijakan PAI juga perlu memperhatikan keberagaman siswa dalam menghadapi era digital. Dengan adanya akses yang berbeda terhadap teknologi, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang sama. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan pendidikan untuk menciptakan sistem yang inklusif, di mana semua siswa, termasuk yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah, dapat mengakses pendidikan agama yang berkualitas. Selanjutnya, dalam merumuskan kebijakan pendidikan, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan. Semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses pengembangan kebijakan agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan semua pihak. Dengan adanya kolaborasi yang baik, kebijakan PAI dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi di era digital.

Di era digital, pentingnya pendidikan karakter juga tidak boleh diabaikan. Kebijakan PAI harus mencakup pengembangan karakter siswa, termasuk sikap toleransi, empati, dan rasa tanggung jawab. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pendidikan agama, diharapkan siswa tidak hanya menjadi penghafal ajaran agama, tetapi juga individu yang mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan evaluasi dan penilaian yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Metode penilaian yang konvensional mungkin tidak lagi relevan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam penilaian yang mencakup aspek-aspek digital, seperti proyek kreatif, presentasi, dan kolaborasi daring. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa (Cahaya, 2022).

Dalam konteks globalisasi, kebijakan PAI di era digital juga harus memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh siswa terkait identitas dan nilai-nilai agama. Dalam menghadapi arus informasi yang beragam, penting bagi pendidikan agama untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang identitas Islam. Kebijakan pendidikan harus mendorong penguatan nilai-nilai agama, sehingga siswa dapat tetap teguh dalam iman dan identitas mereka meskipun berada dalam lingkungan yang beragam.

Pendidikan Agama Islam di era digital juga harus memperhatikan aspek kesehatan mental siswa. Dengan adanya tekanan dari media sosial dan kehidupan daring, siswa sering mengalami stres dan kecemasan. Kebijakan pendidikan perlu mencakup program yang mendukung kesehatan mental, seperti konseling dan pendidikan tentang pengelolaan emosi. Dengan pendekatan yang holistik, pendidikan agama dapat membantu siswa untuk tidak hanya memahami agama, tetapi juga menjaga kesejahteraan mental mereka.

Terakhir, evaluasi dan revisi kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan agama, penting untuk terus memantau efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan pendekatan yang adaptif, kebijakan PAI dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan siswa di era digital (Yahya, 2023).

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di era digital menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Dengan pengembangan kebijakan yang tepat dan responsif terhadap perubahan, PAI dapat terus berperan dalam membentuk karakter dan pemahaman agama siswa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat, tetapi juga mampu menghadapi tantangan di dunia yang semakin kompleks.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital. Proses ini melibatkan penelusuran artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan agama beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sumber-sumber yang dikaji mencakup kajian teori, praktik, dan kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan serta dampaknya terhadap pembelajaran PAI. Dengan menganalisis informasi dari berbagai perspektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam kebijakan pendidikan agama di tengah kemajuan digital.

Hasil dan Pembahasan

1. Signifikansi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan sistem pendidikan di suatu negara. Dalam konteks pendidikan, kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pendidikan yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung proses pembelajaran. Dengan adanya kebijakan yang jelas, semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, guru, siswa, dan orang tua, dapat memahami arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Salah satu pentingnya kebijakan pendidikan adalah untuk memberikan landasan hukum dan regulasi yang mengatur sistem pendidikan. Kebijakan ini membantu menetapkan standar pendidikan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga pendidikan. Dengan adanya standar yang jelas, kualitas pendidikan dapat dijaga, dan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini juga menciptakan keadilan dalam akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, kebijakan pendidikan juga berfungsi untuk menetapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kebijakan, pemerintah dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja. Kurikulum yang baik akan mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kebijakan yang fleksibel memungkinkan kurikulum untuk terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi di masyarakat (Manan, 2023).

Kebijakan pendidikan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pendidikan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan membantu membangun kesadaran dan dukungan terhadap pentingnya pendidikan. Ketika masyarakat merasa terlibat, mereka cenderung lebih mendukung program-program pendidikan yang dijalankan, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya, kebijakan pendidikan dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Dengan menetapkan kebijakan yang mendukung pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Kebijakan pendidikan yang strategis akan membantu menciptakan masyarakat yang terdidik dan berdaya saing.

Kebijakan pendidikan juga berfungsi untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pendanaan pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Dengan adanya dukungan yang cukup, lembaga pendidikan dapat beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa. Kebijakan ini juga mencakup perencanaan jangka panjang untuk memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses oleh generasi mendatang.

Lebih jauh lagi, kebijakan pendidikan berperan penting dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Di banyak negara, masih terdapat perbedaan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik dapat membantu mengurangi kesenjangan ini dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah dan kelompok yang kurang terlayani. Dengan demikian, semua siswa

memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Selain itu, kebijakan pendidikan juga dapat mendukung inovasi dalam pembelajaran. Dalam era digital dan perkembangan teknologi yang cepat, pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan efektif (Nuryadin, 2027). Melalui integrasi teknologi, pendidikan dapat menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.

Kebijakan pendidikan yang baik juga berfokus pada pengembangan profesionalisme guru. Guru merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan, dan kebijakan pendidikan perlu memberikan dukungan kepada mereka dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kompetensi. Dengan meningkatkan kualitas pengajaran, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik dan hasil yang lebih memuaskan. Kebijakan ini harus mencakup sistem evaluasi dan penghargaan yang dapat memotivasi guru untuk terus berkembang.

Pentingnya kebijakan pendidikan juga terlihat dalam upaya untuk membentuk karakter siswa. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap dan nilai-nilai positif. Kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum akan membantu siswa menjadi individu yang beretika dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai.

Kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai penghubung antara pendidikan dan dunia kerja. Dalam mengembangkan kurikulum, kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan industri dan pasar kerja. Dengan menjalin kemitraan antara lembaga pendidikan dan sektor industri, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Kebijakan ini juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran di kalangan lulusan.

Dalam konteks global, kebijakan pendidikan yang baik harus mempertimbangkan perkembangan pendidikan di negara lain. Dengan memahami tren dan praktik terbaik dari berbagai negara, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan relevan. Pertukaran pengalaman dan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam merumuskan kebijakan yang efektif (Hijri, 2023).

Pentingnya kebijakan pendidikan juga terlihat dalam kemampuan untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan di masa depan. Dalam dunia yang terus berubah, kebijakan pendidikan perlu adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Kebijakan yang fleksibel akan memudahkan lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Akhirnya, kebijakan pendidikan yang baik mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan sebagai hak asasi manusia. Pendidikan merupakan hak setiap individu, dan kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan, kebijakan pendidikan dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan beradab.

Kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan meningkatkan sistem pendidikan di suatu negara. Kebijakan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menjamin akses pendidikan yang merata, dan mendukung pengembangan karakter siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan dan

memperbarui kebijakan pendidikan agar dapat memenuhi tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

2. Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Era Digital

Kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital merupakan topik yang semakin penting untuk dibahas, mengingat perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan agama harus beradaptasi agar tetap relevan dengan tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital. Dengan demikian, penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam pengajaran PAI.

Pertama-tama, pentingnya kebijakan pendidikan PAI di era digital terletak pada kemampuannya untuk menjawab kebutuhan siswa yang lebih berorientasi pada teknologi. Generasi muda saat ini tumbuh dalam lingkungan yang dikelilingi oleh gadget dan internet, sehingga kebijakan pendidikan perlu memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran agama. Dengan mengintegrasikan teknologi, proses pembelajaran PAI dapat dilakukan secara lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar.

Kebijakan pendidikan PAI di era digital juga harus mempertimbangkan pengembangan kurikulum yang relevan. Kurikulum yang ada saat ini perlu diperbarui agar mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan merumuskan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman, siswa tidak hanya belajar tentang nilai-nilai agama, tetapi juga memahami bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di dunia digital. Selain itu, kebijakan ini perlu fokus pada pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru dalam mengajar di era digital (Eryandi, 2023). Guru sebagai pengajar utama dalam pendidikan agama perlu dibekali dengan keterampilan teknologi yang memadai untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Pelatihan yang berkesinambungan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama akan membantu guru untuk lebih efektif dalam menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan siswa.

Kebijakan pendidikan PAI di era digital juga harus mengedepankan literasi digital. Siswa perlu diajarkan cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ini termasuk kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang mereka temui di internet, terutama terkait dengan ajaran agama. Dengan meningkatkan literasi digital, siswa akan mampu menyaring informasi dan menghindari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, kebijakan pendidikan PAI harus mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital. Penyebaran informasi yang cepat dan beragam seringkali memunculkan pemahaman yang salah tentang ajaran agama. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan harus mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis terhadap informasi yang mereka terima, sehingga mereka dapat membedakan mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan PAI di era digital juga perlu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai agama. Media sosial memiliki potensi besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Dengan membuat konten yang menarik dan informatif di platform media sosial, pendidikan agama dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh siswa. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan PAI juga tidak boleh diabaikan. Semua pihak perlu dilibatkan dalam proses pengembangan kebijakan agar dapat menciptakan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan

kolaborasi yang baik, kebijakan pendidikan dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan di era digital (Khumaini, 2023).

Kebijakan pendidikan PAI juga harus memfasilitasi aksesibilitas bagi semua siswa, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu. Di era digital, akses terhadap teknologi menjadi sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar (Napitupulu, 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa semua siswa memiliki akses terhadap perangkat dan internet, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran PAI secara maksimal. Tidak kalah penting, kebijakan pendidikan harus memperhatikan dampak kesehatan mental siswa di era digital. Siswa seringkali menghadapi tekanan dari media sosial dan lingkungan digital yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Kebijakan pendidikan perlu mencakup program-program yang mendukung kesehatan mental, seperti konseling dan pendidikan tentang pengelolaan stres, untuk membantu siswa menghadapi tantangan tersebut.

Kebijakan pendidikan PAI di era digital juga harus mencakup penilaian yang relevan dengan konteks digital. Metode penilaian tradisional mungkin tidak lagi efektif untuk mengukur kemampuan siswa dalam dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam penilaian yang dapat mencakup proyek berbasis teknologi, kolaborasi daring, dan presentasi digital. Dengan penilaian yang lebih holistik, kemampuan siswa dapat terukur secara lebih akurat.

Dalam konteks globalisasi, kebijakan pendidikan PAI di era digital juga perlu mempertimbangkan perbedaan budaya dan nilai-nilai di berbagai negara. Pendidikan agama harus dapat menjembatani perbedaan tersebut dan mengajarkan sikap toleransi serta saling menghormati. Kebijakan yang inklusif akan membantu siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan, serta menjadikan mereka individu yang mampu hidup harmonis di masyarakat yang multikultural. Selanjutnya, kebijakan pendidikan PAI di era digital harus memiliki mekanisme evaluasi yang baik untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan (Paramansyah, 2023). Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang telah diterapkan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kebijakan ke depan.

Akhirnya, kebijakan pendidikan PAI di era digital harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Kebijakan yang adil dan merata akan memastikan bahwa semua siswa, di mana pun mereka berada, dapat mengakses pendidikan agama yang memadai dan mengembangkan diri mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di era digital harus dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan kebijakan yang adaptif dan responsif, pendidikan agama dapat terus berperan dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa, serta memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan di dunia yang semakin kompleks. Kebijakan pendidikan yang baik akan menjadi fondasi untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya terdidik, tetapi juga beriman dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di era digital sangat penting untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Dengan merumuskan kebijakan yang adaptif, relevan, dan inklusif,

pendidikan agama dapat dioptimalkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Kebijakan ini harus mencakup pengembangan kurikulum yang sesuai, pelatihan guru, peningkatan literasi digital, serta pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, memastikan aksesibilitas bagi semua siswa, serta mendukung kesehatan mental mereka. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kebijakan pendidikan agama akan mampu membentuk generasi yang tidak hanya beriman, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia modern dengan bijak dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Aslahudin, A., Mansurulloh, D., Paramansyah, A., & Zamakhsari, A. (2023). PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA DIGITAL. *Jurnal Tahsinia*, 4(2), 195-208.
- Cahaya, C. (2022). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar di Era Digital. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 3(2), 1-20.
- Eryandi, E. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Karakter di Era Digital. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(1), 12-16.
- Hajri, M. F. (2023). Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang pada Abad 21. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 33-41.
- Khumaini, F., Isroani, F., Ni'mah, R., Ningrum, I. K., & Thohari, H. (2022). Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Kurikulum dan Pendekatan Humanistik di Era Digital. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(2), 680-692.
- Manan, A. (2023). Pendidikan Islam dan Perkembangan Teknologi: Menggagas Harmoni dalam Era Digital. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 56-73.
- Napitupulu, D. S. (2020). Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam. Haura Utama.
- Noor, A. (2019). Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. In *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*.
- Nuryadin, N. (2017). Strategi Pendidikan Islam Di Era Digital. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 209-226.
- Paramansyah, A., Nurfitriah, N., Wibowo, E. H., Hamdi, F., Ekawati, E., & Dzakiroh, F. (2023). Pengembangan Assesment Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Lembaga Pendidikan Islam Dalam Era Digital. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 822-828.
- Yahya, M. S. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Implementasi Literasi Digital dalam Pembelajaran di Wilayah Banyumas. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 609-616.